

Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Pemilu Inklusif Tahun 2019

Chelsy Shavira^{1*}, Firman Firman²

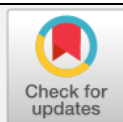
¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

*Korespondensi: Chelsyshavira@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

30 Agustus 2022



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2022 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Shavira, C., & Firman, F. (2022). Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Pemilu Inklusif Tahun 2019. *Journal of Politics and Democracy*, 2(1), 9-23. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i1.20>

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilihan umum Inklusif 2019 dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait keterbatasan komunikasi, data pemilih, permasalahan logistik serta permasalahan perhitungan suara, dan juga upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi sebuah tugas bagi penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat serta pemenuhan fasilitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Inklusif. Pemilu Inklusif dimaksudkan terhadap penyandang disabilitas dengan tujuan pemberian hak dan fasilitas yang sam serta meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Dengan menjadikan startegi sosialisasi pada pemilu tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarkat pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Pada Penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara secara langsung dan studi kepustakaan Pelaksanaan Sosialisasi di Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki beberapa penerapan teori seperti teori sosialisasi, teori pemilihan umum, teori partisipasi serta startegi sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum dan juga adanya pemenuhan fasilitas pemilu akses terhadap penyadang disabilitas serta. Pelaksanaan Sosialisasi dan pemenuhan fasilitas di Kota Adminsitasi Jakarta Timur sudah berjalan cukup baik dan juga memperoleh hasil yang memuaskan pada partisipasi masyarakat pemilih.

The implementation of the 2019 Inclusive General Election was faced with several problems related to limited communication, voter data, logistical problems and vote counting problems, as well as efforts to increase community participation. This becomes a task for the general election organizers, namely the general elections commission to conduct socialization in order to increase public participation and fulfil facilities in the implementation of inclusive general elections. Inclusive elections are intended for persons with disabilities with the aim of providing equal rights and facilities and increasing voter participation of persons with disabilities. By making a socialization strategy in the 2019 election which aims to increase public participation in the 2019 general election. In this study the method used is the qualitative research method with a phenomenological approach and data collection techniques using direct interviews and literature studies of the implementation of socialization in the east Jakarta administration city has several theoretical applications, such as socialization theory, general election theory, participation theory and socialization strategies to increase public participation in the implementation of general elections and also to provide access to election facilities for people with disabilities. The implementation of socialization and fulfilment of facilities in the east Jakarta administration city has been going quite well and also obtained satisfactory results on the participation of the voting community

Kata Kunci: Pemilu; Sosialisasi; Strategi; Disabilitas

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan hak secara langsung terhadap masyarakat dalam menyuarakan hak demokrasinya melalui pemilihan umum atau lebih dikenal dengan sebutan Pemilu. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang juga mempengaruhi kehidupan demokrasi maka didirikanlah Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menyusun dan juga mempersiapkan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara desentralisasi yang menjadikan setiap Daerah memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengurus hal-hal demokrasi di tempatnya, menurut pandangan Joeniarto desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana dikutip (Simandjuntak, 2015). Salah satunya yaitu Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta yang memiliki unit tersendiri tiap Kota Administrasi. Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai objek penelitian.

Dapat dipahami bahwa secara garis besar Komisi Pemilihan Umum merupakan akar dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, maka dari itu penulis tertarik dalam membahas Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif

Tahun 2019. Pemilu Inklusif disini dimaksudkan untuk penyandang disabilitas. Difabel (Differently Abled People) dan penyandang disabilitas adalah dua kata yang menggantikan istilah “cacat” (Rizky, 2021). Reformasi bahasa ini merupakan upaya untuk mengubah makna penyandang disabilitas yang menghadapi stigma dan prasangka negatif dari kelompok non disabilitas. Komunitas disabilitas adalah salah satu kelompok masyarakat yang terwakili dalam masyarakat inklusif; penyandang disabilitas, sebagai masyarakat inklusif, memiliki disparitas dalam hal kemampuan fisik dan kognitif karena ada kekurangan atau kekurangan; bagaimana kita menanggapi variasi ini? Pemilu Inklusif merupakan sebuah upaya dalam pemenuhan hak-hak demokrasi yang juga dimiliki oleh penyandang disabilitas dengan beberapa perbedaan ataupun kebutuhan yang khusus penyandang disabilitas juga memiliki hak suara pada saat pemilihan umum tanpa perbedaan tetapi memiliki keistimewaan dalam fasilitas yang diberikan oleh penyelenggaraan pemilu atau Komisi Pemilihan Umum terhadap pemilih penyandang disabilitas.

Adanya kendala dan rintangan pada pelaksanaan Pemilu 2019 lebih tepatnya pada saat pelaksanaan sosialisasi pemilu baik itu terhadap masyarakat umum dan terlebih lagi khususnya terhadap masyarakat penyandang disabilitas, yaitu seperti adanya keterbatasan pada penyampaian materi dan komunikasi terhadap penyandang disabilitas maupun informasi yang masih belum tersampaikan secara detail terhadap masyarakat umum. Kualitas Layanan, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan diterima dari organisasi public (Firman, 2016). Tetapi hal ini bukan hambatan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dalam berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat, hal-hal ini akan menjadi rumusan masalah pembahasan dalam penelitian ini

Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu aktor penyelenggara pemilihan umum yang termasuk baik dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dijadikan studi kasus dalam penelitian dikarenakan adanya alasan yang dapat memenuhi data penelitian ini. Pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi Juara I Pemilu Akses Tingkat Nasional Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur juga memiliki 4 penghargaan lainnya yaitu Juara Terpopuler RPP se-DKI Jakarta, Juara Pertama Website terbaik se-DKI Jakarta, Juara Pertama Partisipasi Pemilih Tertinggi dan Juara Kedua Pengguna Hak Pilih Perempuan se-DKI Jakarta. Data pada Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur melalui bukunya (Wardana, 2020). Dari faktor tersebut maka penulis akan lebih banyak memperoleh data-data yang akan diteliti serta mempermudah penulis untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan.

Partisipasi pemilih yang tinggi di Kota Administrasi Jakarta Timur bukan berarti Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur tidak memiliki kendala atau permasalahan dalam upaya menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Timur. Beberapa permasalahan secara umum sudah disebutkan oleh penulis pada halaman sebelumnya tetapi dengan fokus permasalahan yaitu pada sosialisasi maka penulis akan membahas bagaimana strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat (Rahmawati, 2016). Untuk sosialisasi secara umum dapat dinilai berjalan lancar serta ada beberapa permasalahan seperti lokasi, anggaran dan misscommunication. Sedangkan untuk sosialisasi

terhadap penyandang disabilitas terdapat beberapa kendala seperti sulitnya komunikasi ataupun interaksi terhadap penyandang disabilitas, tetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan juga memfasilitasi pemilu akses bagi penyandang disabilitas.

Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Data Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ketiga yaitu mencapai 2.246.279 Pemilih dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 1.114.490 Pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 1.131.789 Pemilih yang tersebar di 10 Kecamatan, 65 Kelurahan dan 8.206 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan untuk Data Pemilih Tetap (DPT) masyarakat penyandang disabilitas yaitu berjumlah 2.858 Pemilih.

Berdasarkan data-data tersebut yang merupakan pendukung dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019 terhadap masyarakat umum dan juga khususnya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas, maka dari itu dari penjelasan permasalahan yang ada pada Pemilu Tahun 2019 penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Pemilu Inklusif Tahun 2019.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong (2015) ada 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu: narrative, phenomenology, grounded theory, ethnography, dan case study. Pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi. Studi fenomenologi tidak berfokus pada kehidupan dari seorang individu tetapi lebih pada konsep atau fenomena, dan bentuk studi ini berusaha untuk memahami makna pengalaman individu tentang fenomena ini. Serta menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur. Wawancara adalah proses komunikasi atau kontak antara peneliti dan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, wawancara dapat dilakukan tanpa bertemu langsung, terutama melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi rinci tentang suatu pokok bahasan atau tema penelitian. Atau, itu adalah proses menunjukkan pengetahuan atau informasi yang diterima sebelumnya melalui cara lain. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan sejumlah besar buku, jurnal, artikel, atau sumber berita yang relevan dengan pokok bahasan dan tujuan penelitian (Sandu Sito, 2015).

Teknik fenomenologis digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memberikan informasi yang lebih mendalam sesuai dengan konteks penelitian, dan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis temuan wawancara dan sumber kepustakaan untuk memperoleh data teoritis. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dalam metodologi penelitian kualitatif melakukannya karena fenomenologi mencoba memberikan jawaban deskriptif atas pertanyaan penelitian melalui wawancara atau pengamatan yang paling dekat dengan fenomena (Davison, 2014), sambil mengidentifikasi fenomena sebagai "objek" dari pengalaman manusia (Cresswell 2007). Demikian pula metode kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, atau diarahkan langsung pada sumber data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur atau literatur yang berkaitan langsung dengan Strategi Sosialisasi KPU Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Pemilu Inklusif 2019. Guna memperoleh informasi yang mendalam dan data yang lebih valid

berdasarkan latar belakang penelitian dan kondisi lapangan. Selanjutnya, hasil penelitian kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah, peristiwa, atau situasi yang benar-benar terjadi di lapangan; Penelitian ini juga tidak mementingkan angka-angka, melainkan menggambarkan secara jelas dan rinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Komisi Pemilihan Umum sudah tertulis jelas di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum tetapi dalam penelitian ini penulis berupaya menelaah lebih jauh bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Sosialisasi pada Pemilu Tahun 2019 dengan mewawancarai langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dan juga melihat pandangan dari Pengelola Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin dan Juga pendapat dari kalangan masyarakat. Dalam Pelaksanaan Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Komisi Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki perencanaan pertama yaitu adanya rapat sinkronisasi yang membahas program dan anggaran sebagai perencanaan di awal dan biasanya dilaksanakan di sepertiga tahun pertama yaitu di bulan januari, februari, maret. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Wage selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur.

Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu terbagi menjadi dua yaitu Strategi Sosialisasi budgeting dan Strategi Sosialisasi non budgeting. Strategi sosialisasi budgeting sendiri merupakan sosialisasi yang mengeluarkan serta menggunakan anggaran dalam pelaksanaannya biasanya dilakukan secara formal dengan adanya opening atau ceremony ataupun sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan anggaran yang terbilang lumayan seperti mengadakan pentas seni atau pentas yang memerlukan panggung serta mengundang para pekerja seni seperti band pada pelaksanaan sosialisasinya. Sedangkan untuk strategi sosialisasi non budgeting itu sendiri merupakan sosialisasi yang dilakukan tanpa menggunakan anggaran yang ada hal ini dilakukan sebagai peluang tanpa adanya biaya yang dikeluarkan hal ini juga bertujuan sama dan memberikan dampak yang sama seperti dengan sosialisasi pada umumnya, strategi non budgeting ini sendiripun dilakukan dengan cara Kerjasama antara pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dengan berbagai pihak yang membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan terlebih pada penerapan Pemilu Inklusif yaitu seperti berkerjasama dengan pihak panti-panti sosial bagi penyandang disabilitas, serta Bersama organisasi yang memiliki konsentrasi terhadap isu-isu disabilitas ataupun demokrasi dan politik. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Timur.

Strategi ini sangat bermanfaat bagi sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur karena tidak adanya keterbatasan dari anggaran yang perlu dikeluarkan sosialisasi pun tetap berjalan dengan optimal. Jika sosialisasi yang menggunakan anggaran akan dilaksanakan lebih formal seperti dilakukannya rapat dan ceremony. Strategi non budgeting sendiri dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung kepada dinas sosial dan pengurus panti serta mendatangi panti-panti khususnya di panti sosial bagi penyandang disabilitas lalu bekerja sama dengan para pihak tertentu dalam melaksanakan sosialisasi di panti-panti tersebut. Selain itu dengan cara bekerjasama dengan banyak pihak atau stakeholder terkait sangat membantu terlaksananya sosialisasi non budgeting yaitu dengan badan ad hoc, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dinas sosial, pengelola

panti, organisasi masyarakat yang konsentrasi terhadap isu demokrasi serta isu disabilitas. Hal tersebut juga diungkapkan oleh pihak Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, Cawang.

Segala rencana dan pelaksanaan sudah berjalan sesuai strategi tapi masih ada beberapa rintangan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan sosialisasi lebih khususnya pada saat sosialisasi terhadap penyandang disabilitas. KPU sendiri harus bisa menyampaikannya dengan cara yang mudah dipahami oleh teman-teman penyandang disabilitas yaitu dengan mempersiapkan materi dan Menyusun bagaimana cara penyampaian yang mudah dipahami karena sosialisasi di panti dilakukan terhadap teman-teman odg, tuna Netra, tuna rungu dan tuna wicara. Tidak hanya upaya sosialisasi saja tetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur juga mempunyai program lain yang dilaksanakan yaitu adanya Pelatihan dan Pendidikan baik bagi panitia tempat pemilihan umum (TPS) ataupun relawan demokrasi tetapi juga terhadap penyandang disabilitas. Adanya sosialisasi dan simulasi di panti meningkatkan antisipasi para penyandang disabilitas di panti sosial bina Netra cahaya batin dalam menggunakan hak suaranya.

Kenyamanan di Tempat Pemungutan Suara merupakan hak masyarakat dan juga kewajiban serta peran yang harus diberikan oleh penyelenggara pemilihan umum, selain kenyamanan akses di TPS juga harus bisa diakses oleh semua kalangan lebih tepatnya yaitu ramah disabilitas. Beberapa indikator yang termasuk pemilu akses yaitu akses atau perjalanan menuju tps merupakan jalan yang bisa dilalui oleh pengguna tongkat ataupun pengguna kursi roda seperti jalanan yang rata tidak berbatu dan juga tidak menanjak ataupun turunan yang curam. Selain itu untuk bilik pilih juga harus ramah disabilitas apakah pemilih yang menggunakan kursi roda bisa memasuki bilik tersebut dan apakah bilik tersebut mejanya tidak terlalu tinggi atau ketinggian bagi pengguna kursi roda dan juga tps termasuk tps yang pemilu akses juga harus memiliki panitia yang siap dan bersedia untuk mendampingi para pemilih penyandang disabilitas dengan syarat dan ketentuan yang tertulis selain itu Tps juga harus menyiapkan surat suara brailee khusus untuk penyandang tuna netra.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 sendiri pun masih terdapat beberapa kendala ataupun rintangan hal ini diakibatkan adanya berbagai faktor pendukung dan penghambat, tetapi pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Jakarta Timur berjalan dengan sangat baik bahkan terdapat beberapa pencapaian yang di luar ekspektasi. Dari permasalahan dan tantangan yang terjadi banyak sekali faktor pendukung yang menjadikan adanya beberapa pencapaian oleh Komisi Pemilihan Umum antara lain yaitu, Juara 1 Partisipasi Masyarakat Terbanyak dan juga Juara 1 Pemilu Akses bagi penyandang disabilitas se-Indonesia. Beberapa permasalahan yang terjadi akan dibahas pada subab selanjutnya. Permasalahan maupun rintangan yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur serta solusi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur terkait Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019 mengenai Strategi Sosialisasi, Upaya pemberian Fasilitas, dan Partisipasi masyarakat dan dikhususkan penyandang disabilitas.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Nomor 24 Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.

a. Strategi Sosialisasi Politik

Teknik sosialisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sosialisasi politik. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas strategi politik yang digunakan oleh kandidat, tim pemenang, atau partai politik dengan tujuan memenangkan pemilihan; Namun demikian, strategi politik organisasi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan sosialisasi politik dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masih jarang dilakukan (Wibowo & dkk, 2019).

Sosialisasi di masyarakat umum berjalan dengan lancar tetapi ada rintangan lain yaitu pada saat sosialisasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas yaitu adanya keterbatasan komunikasi dan penyampaian materi. Tantangan inipun dapat diatasi yaitu dengan bantuan para relawan demokrasi karena relawan demokrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan 4 penyandang disabilitas yaitu 2 tuna daksa dan 2 tuna rungu bahkan ada yang alumni dari panti sosial dan juga ada 1 orang yang memiliki keluarga penyandang disabilitas. Dengan solusi ini maka Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur mendapatkan point penting dalam sosialisasi terhadap teman-teman disabilitas.

Dengan Mengadakan Pendidikan dan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik itu panitia Tempat Pemungutan Suara maupun masyarakat pemilih juga diberikan pendidikan dan pelatihan. Komisi Pemilihan Umum melakukan pelatihan pada setiap jenjang dan sesuai dengan tahapannya yaitu pelatihan pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara, perhitungan suara, sosialisasi dan semua pelatihan lainnya dan dilaksanakan secara detail. Pendidikan yang dilakukan khususnya pada Penyandang Disabilitas yaitu diadakannya simulasi pemilihan ataupun pemungutan suara untuk kaum disabilitas di berbagai panti yaitu dengan membuat simulasi sederhana Bersama kaum disabilitas dan panitia tps dan mendapatkan informasi bagaimana cara memperlakukan kaum disabilitas, simulasi ini juga dilakukan dengan cara melatih mereka bagaimana ke TPS serta tata cara menyoblos terlebih lagi terhadap teman tuna Netra yaitu adanya alat praga berupa surat suara braille yang sama persis seperti yang akan mereka gunakan pada saat pemilu dilaksanakan.

Pada Pembahasan ini penulis melakukan Analisa SWOT pada strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dengan melakukan Analisa SWOT maka akan memberikan hasil terkait strategi sosialisasi, serta Analisa SWOT ini membantu dalam penerapan manajemen strategi terutama yaitu pada saat formulasi keputusan strategi, dan juga beberapa hal yang mempengaruhi hasil dari strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Pemilu Tahun 2019.

Analisa SWOT:

1. Strengths (Kekuatan)

Strategi Non budgeting pada sosialisasi dan bantuan relawan demokrasi. Kekuatan pada strategi sosialis yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu adanya penggunaan strategi non budgeting pada sosialisasi dan juga bantuan dari relawan demokrasi, hal menunjukkan adanya kekuatan yang menjadi solusi dalam pelaksanaan sosialisasi di Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu strategi non budgeting juga dilakukan kepada masyarakat umum salahsatunya yaitu dengan memanfaatkan adanya sosial media sebagai wadah sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Weakness (Kekelamahan)

Kendala Komunikasi dengan penyandang tuna wicara. Kekelamahan pada strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi pada Pemilu Tahun 2019 yaitu

adanya kendala saat komunikasi dan juga penyampaian materi serta informasi pada penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna rungu dan tuna wicara.

3. Opportunities (Peluang)

Dengan bantuan relawan demokrasi pihak KPU Jakarta Timur merasa sangat terbantu dalam sosialisasi terhadap penyandang disabilitas dikarenakan adanya relawan demokrasi yang dapat menggunakan Bahasa isyarat untuk penyampaian materi presentasi dan teori yang disesuaikan dan lebih mudah dipahami bagi penyandang disabilitas.

4. Threats (Ancaman)

Kendala penyampaian materi dan informasi yang tidak tersampai secara detail dan kendala data pemilih tetap. Selain itu adanya data pemilih tetap yang masih terus berubah-ubah merupakan kesulitan dalam pengolahan data serta adanya masyarakat yang masih belum terdaftar dan khususnya bagi penyandang disabilitas masih adanya pihak keluarga yang tidak melaporkan jika memiliki keluarga penyandang disabilitas maka masih terdapat misscommunication dalam pelaksanaan pemilu di tiap TPS yang tidak terdaftar adanya masyarakat penyandang disabilitas.

Menurut Scroder (2010) istilah strategi tersebut berkembang pada bidang lain seperti strategi bisnis, strateg pengawasan dan strategi politik, maka dalam hal ini sosialisasi pemilu termaksud dalam jenis strategi politik. Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff, lingkungan dan interaksi di antara variabel-variabel yang mempengaruhi sosialisasi politik memiliki peran dalam efektivitas proses apapun. Faktor-faktor berikut mempengaruhi sukses tidaknya sosialisasi politik:

- a. Agen sosialisasi politik, pada hal ini sosialisasi pemilu dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum serta stakeholder terkait lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Administarsi Jakarta Timur merupakan agen sosialisasi politik utama di Kota Adminsitarsi Jakarta Timur. Selain itu, kehadiran kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat mempengaruhi keterlibatan publik sebagai agen sosialisasi politik.
- b. Materi sosialisasi politik, seperti pengetahuan masyarakat, kepercayaan, dan pandangan politik yang diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada saat sosialisasai dilakukan baik itu terhadap masayrakat umum, masayrakat penyandang disabilitas dan juga kepada setiap panitia TPS, petugas KPPS, dan juga relawan demokrasi. Terlebih lagi adanya Pendidikan dan simulasi yang diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administarsi Jakarta Timur.
- c. Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi tiga yaitu, imitasi, instruksi, motivasi. Mekanisme sosialisasi dalam mentransmisikan elemen-elemen dari sosialisasi melalui beberapa cara, Imitasi, merupakan peniruan terhadap tingkah laku hal ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dengan cara menunjukan sikap-sikap demokrasi serta melakukan simulasi dan Pendidikan. Intruksi, merupakan peristiwa penjelasan diri hal ini dilakukan oleh pihak Komisi Pemilhan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dengan cara menyampaikan teori dan materi yang dipresentasikan serta menjelaskan siapa saja para kandindat atau calon calon wakil rakyat serta melakukan ajakan dan arahan bagaimana menggunakan hak suara dan berpartisipasi pada saat pemilihan umum. Motivasi, lebih banyak diidentifikasi

dengan pengalaman dengan melakukan motivasi khususnya bagi penyandang disabilitas jika mereka memiliki hak suara yang sama dan mereka memiliki hak serta kewajiban dalam melaksanakan kehidupan demokrasi, serta memotivasi bahwa tidak adanya Batasan atau halangan bagi penyandang disabilitas dalam ikut serta dalam pemilihan umum atau kehidupan demokrasi.

- d. Mengetahui proses sosialisasi yang terdiri dari instansi atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, dan interaksi antar instansi dalam melakukan proses sosialisasi merupakan proses yang berkesinambungan yang mengikuti pola sosialisasi politik.

Pendidikan politik adalah proses dialogis di mana komunikan dan komunikator mengidentifikasi dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik negara dari berbagai partai politik. Politisi mengontrol dan membujuk orang untuk mengadopsi keyakinan, konvensi, dan simbol yang mereka yakini ideal dan baik. Inilah yang disebut dengan indoktrinasi politik. Maka dari hasil wawancara dan penelitian Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan sosialisais politik dengan cara Pendidikan politik yaitu dengan cara penyampaian teori dan materi, melakukan Pendidikan dan pelatihan serta melakukan simulasi dan pemberian motivasi atau arahan baik terhadap petugas KPPS, masyarakat umum dan terlebih pada masyarakat penyandang disabilitas ([Rahmawati, 2018](#))

Tujuan dari rencana sosialisasi politik ofensif KPU Kota Administrasi Jakarta Timur ini adalah untuk memobilisasi lebih banyak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 dengan mengedukasi mereka dengan baik tentang proses pemilu dan berbagai tahapannya. Dengan adanya dukungan dan Kerjasama antara stakeholder terkait dan juga terutama adanya Kerjasama dan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan demokrasi memberikan hal-hal positif dalam penerapan strategi sosialisasi pada pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Tahun 2019.

b. Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019

Pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 di Kota Administrasi Jakarta Timur berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang begitu memuaskan. Faktor- factor pendukung dan penghambat juga mempengaruhi pelaksanaan pemilu tahun 2019. Faktor Pendukung tersebut yaitu adanya keterlibatan mereka baik itu stakeholder terkait, relawan demokrasi, masyarakat dan lainnya. Anggaranpun mendukung, situasi kondusif sekretariat mendukung, serta kolaborasi besar seluruh stakeholder Jakarta timur mendukung. Stakeholder terkait yaitu seluruh tim komsii pemilihan umum kota administrasi Jakarta timur, relawan demokrasi, dinas sosial, ormas yang konsnetrasi terkait isu demokrasi dan isu disabilitas, media massa, kpu ri, kpu dki, bawaslu.

Penghambatnya yaitu adanya kekurangan bagaimana cara penyampaian terhadap penyandang disabilitas, dan pada masyarakat umum secara spesifik tidak ada penghambat lebih ke tantangan, semua berjalan dengan baik mau itu cuaca, anggaran, sosialisasi melalui media dan masyarakat tidak ada masalah, tetapi sempat ada penghambat telatnya KPU untuk menetapkan DPT (data pemilih tetap) karena dpt benar benar memepangruhi prosesi pemilu tetapi semua sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berhasil, karena Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur mendapatkan juara 1 partisipasi msayrakat di Jakarta dan juga Juara 1 Pemilu Akses bagi penyandang Disabilitas se-indonesia, hal ini dikarenakan adanya

upaya dan usaha dalam sosialisasi terhadap masyarakat. Tetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur akan terus berupaya dalam meningkatkan performa yaitu belajar dari pengalaman. Partisipasi pemilu adalah point utama karena demokrasi semakin banyak banyak orang terlibat, semakin banyak orang ke tps, semakin banyak orang nyoblos maka siapapun pemimpinnya akan semakin menjadi Karena yang memwakilkan suaranya banyak maka hasilnya akan lebih baik.

Sundariningrum menegaskan bahwa partisipasi dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan cara perikatannya, yaitu:

1. Partisipasi Langsung

Orang berpartisipasi ketika mereka melaksanakan tugas-tugas tertentu yang termasuk dalam proses partisipasi. Keterlibatan ini terjadi ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, mendiskusikan topik, dan menentang keinginan atau ucapan orang lain.

2. Partisipasi tidak langsung

Ketika orang memberikan hak partisipasi mereka kepada orang lain, partisipasi terjadi. Selain itu, Slamet (2003:8) mengklaim bahwa keterlibatan Valderama di Arsito mengamati adanya tiga tradisi pengertian partisipasi, terutama jika dikaitkan dengan pertumbuhan masyarakat demokratis. Tradisi-tradisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik (political participation)
2. Partisipasi social (social participation)
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

Gabriel A. Almond mengajukan pengklasifikasian budaya politik yang dikutip dalam (Nurhidayah, 2014) sebagai berikut:

1. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
2. Budaya politik kaula atau subyek, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif.
3. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Dalam Hal ini Masyarakat pemilih Kota Adminsitarsi Jakarta Timur termasuk dalam budaya politik partisipan dikarenakan tingginya tinggi partsipasi masyarakat pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, hal ini menunjukkan bhawa tingginya kesadaran politik bagi masayarakat Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Adminsitrsi Jakarta Timur memiliki banyak target ataupun hal-hal yang harus dicapai tetapi target utama kita partisipasi pemilu karena demokrasi semakin banyak banyak orang terlibat, semakin banyak orang ke tps, semakin banyak orang nyoblos maka siapapun pemimpinnya akan semakin lebih dipercayai bahkan lebih baik lagi, karena yang memwakilkan suaranya banyak maka hasil pemilih banyak maka akan lebih, Karena jika partisipasi meningkat maka hal lain akan menjadi meningkat, Target peningkatan partisipasi untuk pemilihan umum selanjutnya yaitu sekitar 87%. Dari penelitian ini partisipasi masyarkat Indonesia sudah termasuk Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi terutama pada masyarakat Kota Adminsitarsi Jakarta Timur, hal ini dapat dilihat dari tingginy partisipasi pemilu pada tahun 2019.

c. Upaya Pemenuhan Fasilitas Pemilu Akses

KPU telah mendesain lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas untuk memperlancar proses pemberian suara. PKPU No 3/2009 dan PKPU No 29/2009 mengharuskan panitia menyediakan fasilitas seperti meja tempat bilik suara serta papan tempat pencoblosan khusus untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Pintu masuk dan keluar TPS juga diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pergerakan selama pemungutan suara. Termasuk dukungan alat bantu template bagi penyandang disabilitas netra, fasilitas pilihan menggunakan pendamping, serta perintah penempatan lokasi TPS yang bisa diakses. Selain itu, hak penyandang disabilitas dalam mengakses jabatan-jabatan publik mestinya setara dengan warga negara lain. Sudah paham bersama, baik secara nasional maupun internasional, konsep disabilitas tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani. Bahkan di Indonesia, penegasan soal itu sudah diatur melalui beberapa undang-undang, termasuk UU No 15/2011, UU No 8/2012 dan UU No 42/2008.

Dalam upaya pelaksanaan Pemilu Inklusif Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sudah memenuhi beberapa indikator Menurut kamus (Merriam- Webster) inclusive dapat berarti:

1. Meliputi atau termasuk semua hal, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi sudah berupaya dan melakukan bahwa hak dan keikutsertaan dalam pesta demokrasi yaitu mencakup segala hal dalam penyelenggaraan pemilu. Baik itu sosialisasi, Pendidikan, pelatihan, penyampain informasi, dan pemenuhan fasilitas serta kebutuhan guna mencapai pemilu inklusif.
2. Terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok orang tertentu, Komisi Pemiluhan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sudah melakukan dan menerapkan bahwa pesta demokrasi harus dirayakan oleh semua kelompok kalangan masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa batas tertentu, seperti pada masyarakat penyandang disabilitas, pemilih pemula, pemilih perempuan dan lainnya.
3. Soal parameter dan segala sesuatu di antaranya untuk pelaksanaan pemilu inklusif, KPU Kota Administrasi Jakarta Timur termasuk. Yang dimaksud dengan pemilu inklusif adalah pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara yang memiliki hak untuk memilih, tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial ekonomi, dan lain-lain.

Penyelenggaraan pemilu inklusif dapat berdasar kan pendampingan yang dilakukan ([IFES, 2014](#)) terdapat 5 syarat pemilu yang inklusif antara lain:

1. Hak pilih universal, termasuk orang di bawah perwalian. Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pun memastikan bahwa di Kota Administrasi Jakarta Timur setiap orang ataupun masyarakat memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya tanpa terkecuali.
2. Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur juga memastikan bahwa tidak ada halangan medis ataupun bahasa bagi tiap masyarakat pemilih baik itu terhadap penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi.
3. Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen. Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sudah berupaya untuk menjadikan TPS di Jakarta Timur ramah disabilitas dan memenuhi indikator pemilu akses.

4. Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan Pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS untuk tetap menjaga kerahasiaan dan menyediakan pendamping yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan pada tiap TPS untuk pemilih yang membutuhkan dampingan.
5. Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara taktil atau braille. Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sangat mengutamakan fasilitas atau kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dan pemenuhan indikator pemilu akses seperti surat suara braille dan juga bilik dan lokasi yang ramah disabilitas.

Pencantuman ini diwujudkan dalam daftar pemilih berkualitas tinggi oleh Penyelenggara Pemilu 2019 di Kota Administratif Jakarta Timur. Untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang memenuhi syarat terdaftar untuk memberikan satu suara dalam setiap pemilihan, daftar pemilih yang mencerminkan pemilihan inklusif dibuat atau diperbarui. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa daftar pemilih akan lebih inklusif jika cakupannya lebih luas. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi merupakan ciri lain dari pemilihan umum yang inklusif. Semakin banyak hak suara yang digunakan, semakin banyak jenis pemilih yang terwakili. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilu yang berjalan telah memberikan kesempatan bagi banyak pemilih berkebutuhan atau berkebutuhan khusus untuk memberikan suaranya (Firman, 2018)

Pemilu Inklusif juga harus termasuk dalam pemilu yang aksesibilitas, indikator pemilu akses sendiri dengan menggunakan teori Aksesibilitas. Ada empat akses menurut pengertian aksesibilitas (Bambang Susantono, 2004:24): akses informasi, akses gerak, akses waktu, dan kesempatan memilih. Informasi di atas dimaksudkan sebagai standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan hak politiknya. Di antara 4 akses tersebut adalah:

1. Akses Informasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sudah sangat berupaya dalam penyampaian informasi yang diberikan khususnya terhadap penyandang disabilitas baik itu terkait data, teori dan praktek terkait pemilihan umum.
2. Akses Mobilitas, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sudah berupaya dalam pemenuhan segala lokasi TPS ramah disabilitas dengan akses mobilitas atau perjalanan menuju TPS itu bisa diakses oleh pengguna kursi roda maupun pengguna tongkat, selain itu KPU Jaktim juga sudah berupaya dalam menyediakan panitia yang bisa mendampingi masyarakat disabilitas pada saat memilih khususnya bagi penyandang tuna Netra yang disediakan surat suara braille.
3. Akses Waktu, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi sudah menghimbau bagi panitia TPS atau petugas KPPS untuk memberikan ruang waktu yang lebih lama terhadap disabilitas untuk menggunakan hak suaranya hak ini dilihat dari keterbatasan mereka dalam bergerak. Karena penyandang disabilitas membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencoblos karena keterbatasan gerak yang berbeda dengan masyarakat umum, akses bagi penyandang disabilitas tidak diberikan dari TPS yang berbeda melainkan dari bilik suara khusus penyandang disabilitas.
4. Penyandang disabilitas diberikan lebih banyak akses ke bilik suara saat pemilihan umum di Kota Administrasi Jakarta Timur oleh panitia KPPS sehingga mereka dapat menerima lebih banyak bantuan selama proses pemungutan suara. Namun, TPS penyandang disabilitas tidak menawarkan tempat tertentu; sebaliknya, mereka mengambil bagian dalam komunitas lain. Hanya bantuan khusus yang diberikan pada saat pemilihan dan bilik khusus disiapkan untuk penyandang disabilitas sehingga

mereka tidak perlu mengantri terlalu lama dengan pemilih lain untuk memastikan distribusi TPS merata selain itu juga disediakan fasilitas lainnya seperti surat suara brailee. Penyampaian kesempatan memilih ini juga sangat ditegaskan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta timur dalam pelaksanaan sosialisasi khususnya bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah populasi yang memiliki persyaratan khusus dalam mengakses pemilu. Mereka hanya membutuhkan fasilitas yang dapat mereka gunakan agar mereka dapat menggunakan hak politiknya secara efektif selama pelaksanaan pemilihan, bukan perlakuan khusus. Singkatnya, peralatan yang digunakan harus dapat diakses, demikian juga tata letak ruangan. Aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas, bagaimanapun, melibatkan lebih dari sekedar bagaimana mereka dapat memberikan suara dengan cara yang nyaman pada hari pemilu. Ini juga melibatkan memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses politik sebagai kandidat, penyelenggara, dan pemilih.

Pemberian fasilitas pemilu juga merupakan peran dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum terhadap pemenuhan hak masyarakat selain dari sosialisasi pemberian fasilitas ini berupa keperluan secara fisik seperti beberapa keperluan logistik dan juga lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Khususnya untuk penyandang disabilitas Tempat Pemungutan Suara atau TPS harus ramah disabilitas atau bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Dari hasil wawancara dengan masyarakat merupakan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum guna meningkatkan kualitas fasilitas dan aksesibilitas di TPS, secara umum dari hasil wawancara untuk pemilu akses dan fasilitas di TPS sudah cukup baik tetapi masih ada beberapa evaluasi dari masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timurpun sudah berupaya dalam pemberian fasilitas di TPS dan peningkatan pemilu akses yaitu dengan memastikan pintu masuk atau perjalannya bisa diakses seperti dengan pengguna kursi roda baik ataupun pengguna tongkat itu pintu masuknya maupun perjalanan ke tps tidak menanjak ataupun berbatu dan tidak rata, selain itu juga KPU menyediakan panitia pendamping yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta KPU juga sudah menyediakan surat suara braille khusus penyandang tuna netra tetapi masih ada beberapa kekurangan pada surat suara untuk penyandang tuna netra yaitu tidak adanya foto yang timbul.

Walaupun di beberapa TPS masih belum ramah disabilitas tetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta timur memiliki point-point tertentu yang diambil dari data pemilih berkelanjutan masih adanya beberapa TPS yang tidak ramah disabilitas biasanya diakrenakan tidak masuknya data penyandang disabilitas di lingkungan tersebut baik dari keluarganya yang tidak mendaftarkan ataupun lainnya. Belajar dari pengalaman tersebut hal ini merupakan evaluasi yang akan diberpaiki lagi ditahun kedepannya yaitu dengan berupaya seluruh TPS di Jakarta Timur harus ramah disabilitas baik tps tersebut ada data penyandang disabilitas maupun tidak. Selain itu sosialisasi tentang pendaftaran oleh pihak keluarga yang memiliki keluarga yang berkebutuhan khusus pun akan ditingkatkan lagi agar tidak terjadi miscommunication ataupun kesalah pahaman dalam penyediaan Tempat Pemungutan Suara di Jakarta Timur.

5. Simpulan

Penerapan Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dengan pemenuhan indikator pada sosialisasi politik dan juga indikator pemilu akses, pada hal ini pemilu inklusif

ditujukan terhadap penyandang disabilitas dengan tujuan dan penyampaian bahwa tidak ada perbedaan terhadap pemberian hak-hak masyarakat penyandang disabilitas khususnya pada pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Indikator sosialisasi politik tersebut merupakan Pendidikan politik yang dilakukan pihak KPU Jaktim terhadap masyarakat penyandang disabilitas dan juga pemberian fasilitas pemilu akses yaitu akses informasi, akses mobilitas, akses waktu dan kesempatan memilih yang sudah diberikan sepenuhnya oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur.

Walaupun sudah termasuk berhasil tetapi masih ada beberapa permasalahan pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjadi evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dan juga menjadi bahan literasi bagi dunia Pendidikan dan juga menjadi ajakan serta acuan terhadap masyarakat untuk menggunakan hak suaranya di pemilu yang akan datang. Dengan adanya hasil wawancara dan data pendukung maka dapat disimpulkan strategi sosialisasi yang dilakukan pada sosialisasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Partisipasi Pemilih yang tinggi di Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan hasil yang sangat baik pada pelaksanaan sosialisasi yang dapat disimpulkan bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur berjalan dengan seharusnya dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat umum maupun masyarakat disabilitas baik itu secara teori maupun Pendidikan serta pelatihan dan selain itu fasilitas pemilu akses pun sudah terpenuhi dengan baik serta memenuhi indikator-indikator pemilu akses bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan di atas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur terus berupaya dan mengoptimalkan segala kinerjanya guna memberikan pelayanan ataupun penyelenggaraan pemilihan umum yang baik terhadap masyarakat. Selain itu diharapkan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dapat mensosialisasikan atau menginformasikan lebih detail terkait para kandidat ataupun para calon. Diharapkan bagi Pihak Panti Sosial di Jakarta Timur untuk selalu berkerjasama dengan penyelenggara pemilihan umum guna mempermudah segala komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak penyelenggara pemilu. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap strategi dan keberhasilan sosialisasi pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur dapat menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah lainnya. Kepada peneliti selanjutnya terkait strategi sosialisasi ataupun perwujudan pemilu inklusif untuk terus melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai sosialisasi serta partisipasi dan mengenai pemilu inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Firman, F. (2016). Lelang Jabatan Lurah Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di DKI Jakarta. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2 (1): 1–18. <https://doi.org/10.52447/gov.v2i1.522>
- Firman, F. (2018). Desentralisasi dan monoisme masyarakat (praktek elit lokal melanggengkan dominasi). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 3(2), 115-127. <https://doi.org/10.52447/gov.v3i2.1124>
- IFES. (2014). Akses Setara: Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik. Washington D.C.: International Foundation for Electoral Systems.
- Moleong, L. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurhidayah. (2014). Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Rahmawati, R. (2018). Populisme di Aras Demokrasi Indonesia. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(1). <https://doi.org/10.20884/1.juss.2018.2.1.1225>
- Rahmawati, R. (2016). Pengaruh Figur Calon Pemimpin Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Sunter Agung, pada Pemilukada DKI Jakarta 2012. *Journal of Governance*, 1(1), 99-119. <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v1i1.1841>
- Rizky, U. F. (2021). Pelatihan Inklusif Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Komunitas SOBAT Difabel. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment* 1 (1): 57–68. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i1.1783>
- Sandu Sitoyo, D. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Pubhling.
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(1), 57-67. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Wardana, W. (2020). *Roller Coaster Pemilu: Catatan Pemilu 2019 di Jakarta Timur*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
- Wibowo, E. A., Muradi, & Sudirman, A. (2019). *Strategi Sosialisasi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak Di Kota Magelang*. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.

Tentang Penulis

Chelsy Shavira, Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, saat ini penulis telah lulus dari jurusan tersebut.

Firman Firman, penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, saat ini penulis telah lulus dari jurusan tersebut.